

UPAYA PEMERANTASAN BUTA HURUF DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 1942-1962

ILLITERACY ERADICATION EFFORTS IN KULON PROGO REGENCY 1942-1962

Oleh: Digna Essy Marthea, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, dignamarthea@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan proses Pemberantasan Buta Huruf, serta dampaknya bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1942-1962. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis yang menggunakan empat tahapan penelitian, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama masa penjajahan, masyarakat Kulon Progo tidak mendapatkan pendidikan secara layak sehingga banyak yang masih buta huruf. Keterbelakangan pendidikan ini menyadarkan para pemimpin gerakan rakyat. Kadipaten Pakualaman mengeluarkan surat keputusan pembentukan panitia pemberantasan buta huruf pada tahun 1942 untuk wilayah Adikarta. Pada tahun 1944, Kasultanan Yogyakarta juga mengeluarkan keputusan mengenai pemberantasan buta huruf dan berlaku di seluruh wilayah Kulon Progo. Setelah Indonesia merdeka, upaya pemberantasan buta huruf lebih dikenal dengan *kursus ABC* yang dikoordinasi di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Keberhasilan Pemberantasan Buta Huruf memberikan dampak yang luas pada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo terutama dalam bidang sosial, budaya serta ekonomi.

Kata kunci: *Buta Huruf, Kabupaten Kulon Progo, Pemberantasan*

Abstract

The purpose of this research was to determine the background and process of eradicating illiteracy, and its impact on the people in Kulon Progo Regency in 1942-1962. This research uses a critical historical research method that uses four stages of research: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this research showed that during the colonial period, the people of Kulon Progo did not get proper education so that many were still illiterate. This backwardness of educational made the leaders of the people aware. The Duchy of Pakualaman issued a decree establishing the illiteracy eradication committee in 1942 for the Adikarta region. In 1944, the Yogyakarta Sultanate also issued a decree concerning eradicating illiteracy and was valid in the entire Kulon Progo area. After Indonesia's independence, illiteracy eradication efforts are better known as *ABC courses* which are coordinated under the Ministry of Education, Teaching, and Culture. The success of the Illiteracy Eradication has a wide impact on the people of Kulon Progo Regency, especially in the social, cultural, and economic fields.

Keywords : *Illiteracy, Kulon Progo Regency, Eradication*

PENDAHULUAN

Selama masa kolonial Belanda, pendidikan yang dijalankan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rakyat Indonesia yang mengabdikan kepada kepentingan penjajahan. Pendidikan hanya digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi Belanda.¹ Sistem dualisme yang berlaku dalam dunia pendidikan era kolonial merupakan garis pemisah antara pendidikan untuk golongan Eropa dan golongan bumi putera. Hal tersebut mengakibatkan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi rakyat bumi putera pada zaman kolonial sangat minim dan tidak merata.

Kesempatan pendidikan diutamakan kepada anak-anak bangsawan bumi putera, tokoh-tokoh terkemuka dan pegawai kolonial. Pemerintah kolonial Belanda mengharapkan dengan memberikan kesempatan pendidikan untuk anak-anak bangsawan bumi putera nantinya akan menjadi kader pemimpin yang berjiwa kebarat-baratan dan merupakan kelompok elit yang terpisah dengan masyarakatnya sendiri. Kaum bangsawan serta tokoh-tokoh yang telah memperoleh prioritas pendidikan akan dijadikan tameng bila terjadi ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah kolonial.²

Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumi putera disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kolonial. Tujuan pendidikan hanya untuk memenuhi keperluan tenaga buruh tingkat rendah dan sebagian dilatih untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian dan lain-lain. Secara umum sistem pendidikan pada pemerintah kolonial Belanda didasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial yang ada. Rakyat Indonesia yang miskin sama sekali tidak ada kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Keadaan pendidikan saat itu belum merata dan mengakibatkan masih banyak rakyat yang buta huruf.³

Buta huruf bukan sekedar tidak mampu membaca dan menulis, melainkan berpotensi menimbulkan serangkaian dampak yang sangat luas. Kesuksesan penuntasan buta aksara dapat meningkatkan indeks atau kualitas pembangunan manusia. Sebaliknya, kegagalan penuntasan buta aksara akan berdampak negatif tidak cuma pada penurunan indeks pembangunan manusia, tetapi juga menjadi penghambat pembangunan pada sektor lainnya.

Pada tahun 1942 dengan jatuhnya pemerintah kolonial Belanda dan berkuasanya Jepang atas Indonesia, Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman juga berada di bawah kekuasaan Jepang. Pada masa Jepang ini, sistem dualisme yang berlaku dalam sistem pengajaran dan berbagai jenis sekolah rendah mulai dihapuskan. Sebagai salah satu bentuk doktrin anti Belanda, Jepang menutup banyak

¹ Djohan Makmur, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), hlm. 73.

² Ary H. Gunawan, *Kebijakan Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 12.

³ Djohan Makmur, dkk., *op. cit.*, hlm.74-76.

sekolah dan melarang peredaran buku-buku berbahasa Belanda. Bahasa Belanda dilarang dan semua pertukaran dengan Eropa terhenti selama tiga tahun. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar dan merupakan mata pelajaran wajib di semua sekolah.⁴ Periode kekuasaan Jepang memiliki nuansa militer yang kuat sebab Jepang sedang menghadapi Perang Pasifik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di Yogyakarta kurang teratur.

Jumlah sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah kejuruan menurun drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20, dan jumlah perguruan tinggi hanya tinggal 4 buah. Selain itu, jumlah murid sekolah dasar juga merosot 30 persen., sedangkan murid sekolah menengah merosot 90 persen. Guru-guru sekolah dasar hanya tersisa 35 persen dari jumlah sebelumnya dan guru sekolah menengah yang masih aktif hanya tersisa 5 persen. Kemunduran dalam bidang pendidikan ini mengakibatkan makin bertambahnya orang yang buta huruf.⁵ Keterbelakangan pendidikan ini menyadarkan para pemimpin pergerakan rakyat. Mereka disamping berjuang di lapangan politik untuk mencapai kemerdekaan juga mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang

ekonomi dan pendidikan.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan proses Pemberantasan Buta Huruf, serta dampaknya bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1942-1962.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah merupakan usaha untuk menggunakan data-data yang ada sebagai suatu sumber primer maupun sekunder sebagai bukti adanya peristiwa sejarah sehingga sebuah kisah sejarah dapat dipertanggungjawabkan. Metode sejarah kritis terdiri dari empat tahap penelitian, yaitu:

1. Heuristik

Heuristik merupakan kegiatan pengumpulan sumber yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan sumber dalam penelitian ini dilakukan di Ruang Arsip dan Perpustakaan Puro Pakualaman, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Dan Perpustakaan Kota Daerah Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah kesaksiaan dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindra yang lain, atau dengan alat mekanis seperti

⁴ Sri Sutjiatiningsih dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980/1981), hlm. 14.

⁵ Asti Kurniawati, *Membangun (?) Narasi, menghadirkan Pesona akar dan Perjalanan Citra Yogyakarta "Kota Pendidikan"*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 69.

⁶ Sumarsono Mestoko, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 237.

diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya.⁷Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Arsip

Arsip Puro Paku-Alaman No.1518.

Arsip Puro Paku-Alaman No. 1519.

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2068.

2) Wawancara

Wawancara dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data keterangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini wawancara merupakan metode utama dalam observasi. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berfokus dalam tema penelitian sehingga yang dapat informasi yang cukup mendalam. Dalam menggunakan teknik wawancara akan diperoleh informasi mengenai program pemberantasan buta huruf.

Sumber-sumber sekunder yang digunakan antara lain:

Ary H. Gunawan, *Kebijakan Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Asti Kurniawati, *Membangun (?) Narasi, Menghadirkan Pesona Akar dan Perjalanan Citra Yogyakarta “ Kota Pendidikan”*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Sri Sutjiatiningsih dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980/1981.

Sumarsono Moestoko, *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber yang digunakan baik terhadap bahan materi (ekstern) sumber maupun terhadap substansi (isi) sumber.⁸ Kritik esktern merupakan kritik terhadap keaslian atau autentisitas sumber yang dilakukan dengan cara pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sebuah sumber sejarah. Dalam penelitian ini kritik ekstern dilakukan dengan menyeleksi bentuk sumber data tertulis serta aspek fisik meliputi pengarang, tahun, tempat penerbitan sumber, serta gaya bahasa. Sedangkan kritik intern merupakan cara untuk menilai bagaimana isi dari sebuah arsip yang ditemukan. Kritik intern ini dilakukan dengan melihat isi, penulis, dan tahun sumber.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran yang dilakukan oleh seorang sejarawan terhadap data-data yang sudah terseleksi. Penafsiran sering dijadikan pemicu dari subjektifitas, sebagian itu benar tetapi sebagian salah. Tujuan dari interpretasi adalah menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh setelah diterapkan kritik ekstern maupun kritik intern dari data-data yang

⁷ Louis Gottschalk, *Understanding History Understanding History: A Primer Historical Method*, a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2005), hlm. 12.

didapatkan sehingga memberikan kesatuan berupa bentuk peristiwa lampau.⁹

4. Historiografi

Historiografi adalah kegiatan akhir dari penelitian sejarah, yaitu berupa kegiatan merumuskan kisah sejarah secara kronologis dan sistematis. Historiografi adalah kegiatan rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah. Bentuk penulisannya bersifat diakronis, yaitu menerangkan peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Sebagai disiplin ilmu sejarah juga berusaha melihat sudut batasan waktu dan tempat.¹⁰ Di dalam penelitian sejarah penting adanya perhatian untuk batasan tempat dan waktu. Penelitian ini menggunakan model penulisan sejarah analitis yang berpusat pada pokok permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian akan diuraikan secara sistematis. Dengan titik berat pada permasalahan inilah, maka sejarah analitis memerlukan bantuan ilmu-ilmu sosial dalam kajiannya.¹¹

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pendidikan

Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates merupakan salah satu kabupaten

dari lima Kabupaten/Kotamadya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak 30 kilometer sebelah Barat kota Yogyakarta. Terbentuknya Kabupaten Kulon Progo tidak terlepas dengan adanya keberadaan Yogyakarta sebagai ibu kota provinsinya. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memiliki daerah kekuasaan yang masing-masing wilayahnya terletak di bagian barat Sungai Progo, yang saat ini dikenal sebagai wilayah Kabupaten Kulon Progo. Nama Kulon Progo sendiri berasal dari kata *kulon* yang berarti dalam bahasa Jawa artinya barat, dan kata Progo yang merupakan nama sebuah sungai, sehingga dapat dikatakan bahwa kabupaten ini terletak di sebelah barat Sungai Progo. Daerah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta berada di wilayah utara dengan nama Kabupaten Kulon Progo dan wilayah selatan adalah wilayah kekuasaan Paku Alaman dengan nama Kabupaten Adikarta.¹²

Pada tahun 1950, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman diakui secara hukum sebagai daerah istimewa dalam NKRI. Pengakuan ini disusul dengan terbitnya Undang-undang No. 15 tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo dan Adikarta. Untuk menghindari adanya dua daerah istimewa dalam wilayah kasultanan, maka pada tahun 1951 Sri Sultan

⁹ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 34.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994), hlm. 158-159.

¹¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 9.

¹² Badan Pusat Statistik Kulon Progo, *Kulon Progo dalam Angka 2005/ Kulon Progo in Figur 2004*, (Wates: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2004), hlm. xxi.

Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII memikirkan perlunya penggabungan wilayah Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kabupaten Kulon Progo. Secara yuridis, penggabungan ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1951.¹³

Secara umum, masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta hanya mengenal pendidikan tradisional keagamaan yang digelar di masjid atau surau. Sampai abad ke-19 tingkat melek huruf di Kabupaten Kulon Progo tergolong rendah. Pemerintah lokal, baik Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman, tidak tinggal diam menanggapi masalah buta huruf ini. Pada tahun 1892 ketika *legiun* (tentara) dibubarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda, KGPAA Paku Alam V mengeluarkan kebijakan agar anak-anak *sentono* Pakualaman dapat diterima menjadi murid di sekolah-sekolah Belanda. Bagi anak-anak pegawai Pakualaman disediakan sebuah sekolah partikelir yang setingkat dengan sekolah gubernemen yang ada di luar daerah Yogyakarta. Sekolah tersebut dipimpin oleh Ngabei Wirohaksoro sebagai Kepala Sekolah. Selain itu, ada juga sekolah partikelir yang disiapkan untuk masyarakat Pakualaman.¹⁴ Sekolah-sekolah tersebut yaitu:

1. Sekolah Surjengyuritan Lor yang tempatnya berada di pendopo Kanjeng Pangeran Surjaningyurut, putra keempat KGPAA Paku Alam I.
2. Sekolah Padmosekarnan yang berada di kampung Gunungketur yang berada di sebelah timur jalan Gunungketur. Sekolah ini berada di kompleks rumah Ngabei Padmosekarna. 39
3. Sekolah Ongko Loro yang berada di Adikarta.¹⁵

Memasuki abad ke-20, jumlah sekolah di Kabupaten Kulon Progo bertambah dengan pembukaan sekolah-sekolah rakyat yang merupakan bagian dari program “politik etis” pemerintah kolonial. Sifat dualistis terkait bahasa pengantar bahasa pengantar dan sistem pengajaran yang dibawa oleh pemerintah kolonial tentu sangat berpengaruh bagi perkembangan pendidikan di Adikarta. Dampak sosial yang timbul dari sistem tersebut yaitu menjadikan bahasa sebagai lambang status di lingkungan masyarakat. Hal ini juga mendorong kaum cendekia mendirikan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, diantaranya Budi Utomo, Muhammadiyah, dan Taman Siswa. Namun ternyata masalah buta huruf belum dapat teratasi.

Pada masa Jepang, masyarakat Kulon Progo dan Adikarta dimanfaatkan sebagai *romusha*. Jepang memerlukan tenaga kasar untuk membangun prasarana perang seperti kubu-kubu, parit, terowongan-terowongan dan lain-lain. Pada awalnya tenaga kasar itu diambil

¹³ Jawatan Pemerintahan Umum buku 2 No. 811. Mengenai Penggabungan Kabupaten Adikarta dan Kabupaten Kulon Progo.

¹⁴ Nasruddin Anshory dan GKR Pembayun, *Pendidikan Berwawasan Kebangsaan: Kesadaran Ilmiah Berbasis Multikulturalisme*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 30.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

dari orang-orang yang menganggur dan sudah menjadi miskin, tetapi seiring waktu Jepang harus mencari tenaga lain, oleh karena itu tenaga-tenaga itu diperoleh di desa-desa. Pengerahan tenaga kerja untuk *romusha* di Kulon Progo nasib rakyat sangat bergantung pada kebijaksanaan kepala desa. Jika kepala desa bersifat pemberani dan pandai hanya sedikit saja penduduk yang dijadikan *romusha*. Situasi kesehatan dan makanan pada waktu pendudukan Jepang di Kulon Progo saat itu tidak terjamin. Pekerjaan yang terlalu berat menyebabkan banyak pekerja *romusha* meninggal dunia ditempat kerjanya. Agar dapat memperoleh tenaga kerja *romusha* secara mudah, Jepang mengadakan kampanye. Kampanye itu pada *romusha* disebut prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja.¹⁶ Selain itu, murid-murid sekolah juga seringkali harus melakukan latihan baris-berbaris dan turut menjadi *romusha*. Dengan demikian, banyak orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kondisi inilah yang menyebabkan angka buta huruf penduduk Kulon Progo pada saat itu sangat tinggi.

Pemberantasan Buta Huruf

Keterbelakangan di bidang pendidikan disebabkan banyaknya rakyat di Indonesia yang

masih buta huruf atau belum melek huruf.¹⁷ Selama masa penjajahan, pendidikan yang diperoleh bangsa Indonesia sangat kurang. Sampai abad ke-19, kurang lebih sebanyak 94% penduduk Indonesia masih belum bisa membaca dan menulis.¹⁸ Besarnya jumlah buta huruf secara umum di sebabkan oleh beberapa faktor yakni kemiskinan penduduk, orang tua sebagian menganggap bahwa sekolah itu tidak penting, adanya jumlah anak usia sekolah yang tidak tertampung disekolah, kurangnya pembinaan dengan bahan bacaan yang terus-menerus menyebabkan orang-orang dewasa sebagai aksarawan baru akhirnya menjadi buta huruf kembali, dan tingkat putus sekolah dasar menjadikan buta aksara kembali karena tidak adanya pembinaan terhadap mereka.¹⁹

Pemberantasan buta huruf di Kabupaten Kulon Progo mulai dilakukan dengan perencanaan program kursus membaca dan menulis sejak tahun 1942. Program pemberantasan buta huruf bertujuan untuk memberikan kesempatan rakyat dalam mengenyam pendidikan. Pelaksanaan program pemberantasan buta huruf pada awal berjalan dengan lambat karena keadaan yang sedang serba sulit. Hal tersebut dikarenakan peraturan dari Pemerintah Jepang yang mengharuskan adanya izin terlebih dahulu untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pada tahun 1944, Pemerintah Kasultanan Yogyakarta mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk struktur panitia

¹⁶ Suratmin, dkk., *Peranan Sejarah dan Budaya dalam Mendukung Perkembangan Obyek Wisata Budaya di Daerah Kabupaten Dati II Kulon Progo*, (Yogyakarta: BAPPEDA Daerah Tingkat II Kulon Progo Bekerjasama dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 1997/1998), hlm. 32-36.

¹⁷ Ary H. Gunawan, *op.cit.*, hlm. 59.

¹⁸ Sumarsono Mestoko, *loc.cit.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 238.

pemberantasan buta huruf di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta di bawah tanggung jawab Bupati Paniradya Pati Wiyata Praja Yogyakarta K.R.T Notojoedo. Panitia pemberantasan buta huruf ini selanjutnya berubah menjadi P.W.S (*Pambrasta Woeta Sastra*). Tugas panitia P.W.S mengurus segala hal yang berhubungan dengan pelajaran dan pendidikan, termasuk mengumpulkan murid atau siswa serta guru yang mengajar, selain itu panitia mengurus tempat-tempat dimana akan dilaksanakannya kegiatan.

Panitia P.W.S dalam perkembangannya memiliki tugas-tugas yang lebih berat yaitu menjadi penuntun untuk menjelaskan cara memberantas buta huruf dengan metode pengajaran, mengurus tenaga pengajar dan guru, mengawasi dan memeriksa perilaku kursus pemberantasan buta huruf di setiap daerahnya, mampu bekerjasama dengan mendirikan dan mengurus untuk memajukan kursus buta huruf, dan menyediakan buku pelajaran, serta alat-alat untuk kegiatan belajar mengajar seperti kapur, sabak, pensil dan buku.²⁰

Kursus Pemberantasan Buta Huruf dilaksanakan secara gratis, tetapi masih saja banyak orang tidak mau mengikuti. Menurut laporan Panitia P.W.S pada 12 September 1944 jumlah orang yang terdata buta huruf kurang lebih 33.269 orang. Kursus yang dibuka pada bulan Agustus, tingkat kehadiran murid yang datang masih rendah. Murid yang datang lebih

sedikit dibandingkan jumlah peserta yang mengikuti kursus, berikut banyaknya siswa yang mengikuti:

Tabel 01
Jumlah Murid Kursus Pemberantasan Buta Huruf
(Agustus 1944)

Tempat	Jumlah murid	
	Pria	Wanita
Wates	2668	2276
Temon	1997	2097
Panjatan	1293	1204
Galur	2036	737
Jumlah	7994	6314

Sumber: *Arsip Puro Paku-Alaman No. 2068*. Bersisi tentang laporan bulanan pemberantasan buta huruf di Kabupaten Kulon Progo.

Metode yang digunakan dalam kursus pemberantasan buta huruf cukup sederhana. Para murid kursus pemberantasan buta huruf diajarkan membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, namun para pengajar menggunakan bahasa daerah untuk bahasa penyampaian kepada murid-murid agar lebih mudah dipahami. Cara mengajar yang digunakan dengan adanya buku panduan penuntun dari P.W.S. Satu pelajaran misalnya itu 60 menit dibagi menjadi 5 bagian, urutannya yaitu dengan cara:

1. Menumbuhkan semangat kurang lebih 4 menit yang dilakukan dengan dongeng pendek dan menerangkan arti kalimat-kalimat utama yang kebetulan akan dihafalkan.
2. Menghafalkan kalimat-kalimat utama dengan teliti selama kurang lebih 6 menit.

²⁰ *Arsip Puro Paku-Alaman No. 2068*. Bersisi tentang laporan bulanan Pemberantasan Buta Huruf di Kabupaten Adikarta.

3. Membandingkan bentuk huruf satu persatu seperti menulis, membaca, dan dikte kurang lebih 10 menit.
4. Membaca suku kata yang biasa, kekanan kekiri, turun naik, dan acak kurang lebih satu setengah bulan dapat semua.
5. Menulis dan mendikte kurang lebih 10 menit. Pada mulanya penulis huruf terbitan atau cetakan sesudah belajar beberapa minggu kemudian mulai menulis tulisan tangan.²¹

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, upaya pemberantasan buta huruf dilakukan dengan lebih giat agar tidak terjadi kemunduran kembali dalam pelaksanaannya. Sejak awal kemerdekaan pemberantasan buta huruf dikenal dengan *kursus ABC (Analfabetisme Bestrijdings Comite)*. Usaha pemberantasan buta huruf di Kabupaten Kulon Progo juga mengalami perubahan setelah Indonesia merdeka.²²

Usaha dalam pemberantasan buta huruf tahun 1946 ditangani oleh pemerintah melalui Bagian Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Hal tersebut sebagai realisasi dari usaha pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang telah diusulkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.²³ Pemerintah berupaya menangani perbaikan dan peningkatan dalam pendidikan. Usaha perbaikan tersebut

merupakan usaha untuk mengubah keadaan agar suasananya menjadi lebih baik dari pada masa lalu, sehingga pembaruan dalam usaha pemberantasan buta huruf mulai dilakukan kembali.²⁴

Pada tanggal 5 April 1946, *Paniradya Wiyata Praja Ngayogyakarta* memberikan surat perintah tentang pemberitahuan kepada Pemerintah Praja Pakualaman untuk ikut dalam Panitia Pemberantasan Buta Huruf. Surat tersebut berisi tentang perintah untuk memberantas buta huruf di Kabupaten Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Setiap *kepanewon*, *kemantren*, pamong praja, dan kelurahan (rukun kampung) diperintahkan membentuk panitia pemberantasan buta huruf seperti guru-guru, pamong praja, pegawai negara dan wakil perkumpulan. Semua diperintahkan bersatu dalam kepanitiaan tersebut agar bisamemberantas penyakit buta huruf.²⁵

Pada tahun 1951, pemerintah mengadakan Rencana 10 Tahun Pendidikan Masyarakat yang didalamnya termasuk pula rencana menghabiskan buta huruf di Indonesia dalam waktu sepuluh tahun.²⁶ Untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam

²⁴ Helius Sjamsuddin, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional), hlm. 36.

²⁵ *Arsip Puro Paku-Alaman No. 2086, loc.cit.*

²⁶ Sumarsono Mestoko, *op.cit.*, hlm. 179.

²¹ *Ibid.*

²² Ary H. Gunawan, *op.cit.*, hlm. 32.

²³ *Ibid.*, hlm 59.

PBH maka diusahakan perpustakaan rakyat. Buku yang dicetak dalam berbagai bahasa daerah, misalnya Madura, Jawa, Sumbawa, Bali, Sunda, dan sebagainya. Disamping itu juga dicetak buku-buku konsumsi tamatan PBH itu ke dalam bahasa Indonesia.²⁷ Namun ternyata, pada tahun 1960 masih terdapat sekitar 40% penduduk Indonesia khususnya orang dewasa yang masih buta huruf. Kemudian pada tahun 1960, dikeluarkanlah "Komando Presiden" untuk menuntaskan buta huruf sampai habis.

Berdasarkan adanya Komando Presiden, kemudian diadakan konferensi antara Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Daerah-daerah Swatantra Tingkat II di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 1961 di Wates, ibukota Kabupaten Kulon Progo. Diputuskan bahwa buta huruf diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Kabupaten Kulon Progo harus dinyatakan sudah selesai pada tanggal 17 Agustus 1962 tepat pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan yang ke-17. Selanjutnya pada tanggal 1 November 1961, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan pemberantasan buta huruf di seluruh daerah, yang dimulai di rukun kampung. Untuk menyelenggarakan pemberantasan buta huruf maka di Kotapraja maupun di Kabupaten Kulon Progo dibentuk

Badan Penggerak Penyelesaian Buta Huruf (BPPBH) yang terdiri dari instansi-instansi sipil maupun polisi ataupun militer bersama-sama dengan organisasi-organisasi masyarakat.²⁸

Metode dalam kursus pemberantasan buta huruf yang digunakan di Kabupaten Kulon Progo masih dengan model keaksaraan tradisional (*traditional literacy*) dan menggunakan buku primer. Pelaksanaan kursus membaca dan menulis tidak jauh berbeda dengan cara-cara atau metode yang dilakukan sebelumnya. Kursus membaca dan menulis dilaksanakan disetiap kelurahan. Tempat yang digunakan untuk kursus membaca dan menulis biasanya di Balai Desa, karena memiliki ruangan yang luas. Waktu kursus dilaksanakan berbeda-beda setiap kelurahan. Bahasa yang digunakan dalam mengajar kursus membaca dan menulis adalah bahasa Indonesia.

Pada tanggal 16 Mei 1962 BPPBH daerah Kabupaten Kulon Progo memberikan laporan dan penyerahan hasil gerak penyelesaian pemberantasan buta huruf.

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 1 sampai dengan 30 April 1962, Seksi Penelitian BPPBH Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa serentak dalam daerah 951 pedukuhan, 88 kelurahan, dan 12 kecamatan Daerah Tingkat II Kulon Progo telah diadakan usaha pemberantasan buta huruf.

Berdasarkan instruksi Bupati Kepala Daerah Kulon Progo tanggal 24 Januari 1962 atas pelaksanaan Komando Presiden RI tanggal 17 Agustus 1960, tugas yang menjadi

²⁷ Suradi H.P., dkk., *Sejarah Pemikiran dan Kebudayaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986), hlm. 77.

²⁸ *Arsip Puro Paku-Alaman No. 1518.*

kewajiban dari BPPBH Daerah Tingkat II Kulon Progo tetang pemberantasan buta huruf telah selesai dan berhasil dengan baik.²⁹

Tabel 02
Daftar Jumlah Penduduk Buta Huruf di Kabupaten Kulon Progo

Tahun	Jumlah Penduduk Buta Huruf
1953	144.671
1954	127.294
1961	123.109
1962	14.754

Diolah dari: Jawatan Pemerintahan Umum buku 1 No. 667 dan *Arsip Puro Paku Alaman NO. 1519*

Dampak Pemberantasan Buta Huruf

Kursus pemberantasan buta huruf yang ada di Kabupaten Kulon Progo tentu berkontribusi memberikan kesempatan untuk penyandang buta huruf khususnya orang dewasa di Kabupaten Kulon Progo mendapatkan pendidikan. Kemampuan masyarakat dalam pendidikan minimal terbebas dari buta huruf menjadi salah satu indikator dari indeks pengembangan sumber daya manusia.³⁰ Artinya jika masyarakat telah berkemampuan membaca dan menulis, mereka telah memiliki modal untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan.³¹ Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat, semakin tidak

sulit untuk memberdayakan diri dan masyarakat.

Dibidang sosial pemberantasan buta huruf berdampak pada peralihan dari bentuk lama ke bentuk baru yang sesuai dengan sikap dinamis yang mulai dimiliki masyarakat.³² Selain itu tampak adanya peningkatan aktivitas dalam kegiatan sosial di masyarakat. Setelah diadakannya pemberantasan buta huruf, peningkatan dalam bidang sosial dapat dilihat dari peningkatan rasa percaya diri peserta kursus yang ikut berpartisipasi aktif. Karena peserta kursus pemberantasan buta huruf diajarkan bagaimana bersosialisasi di dalam kelas dengan murid lainnya maupun dengan guru.

Seiring berjalannya waktu, pengaruh positif Pemberantasan Buta Huruf yang dibuktikan dengan menurunnya angka buta huruf di Kabupaten Kulon Progo dapat mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Bahasa Indonesia juga semakin meningkat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan masyarakat sehari-hari selain bahasa Jawa.³³

Dengan kecakapan membaca dan menulis yang didapatkan dari kursus Pemberantasan Buta Huruf, masyarakat Kulon Progo lebih berpotensi untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya dan *skill* yang dimiliki karena sudah melek literasi. Manfaat yang diperoleh dari literasi tidak hanya

²⁹ *Arsip Puro Paku-Alaman No. 1519.*

³⁰ Mulyani A. Nurhadi, "Program Kerja Strategi Pendidikan Nonformal di Indonesia", *Cakrawala Pendidikan*, (Edisi 1, Th. III, 1983), hlm. 3-9.

³¹ Mariyono, "Strategi Pemberantasan Buta Aksara Melalui Penggunaan Teknik Metastatis Berbasis Keluarga", dalam *Pancaran* (Vol. 5, No. 1, 2016), hlm 58.

³² Soedarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung, 1970, hlm. 90.

³³ Mariyono, op.cit., hlm 64.

diartikan sebagai manfaat ekonomi, namun juga manfaat budaya. Literasi dapat bermanfaat dalam budaya melalui nilai, sikap, pandangan, serta gaya hidup yang diperoleh dalam keluarga atau masyarakat, yang kemudian mampu meningkatkan partisipasi individu dalam kehidupannya. Selain meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Bahasa Indonesia dan meningkatnya literasi, berkembangnya program Pemberantasan Buta Huruf di Kabupaten Kulon Progo juga berdampak pada perubahan pandangan masyarakat tentang pentingnya membaca dan menulis. Antusiasme masyarakat Kulon Progo terhadap kursus pemberantasan buta huruf semakin meningkat. Seakan-akan telah menjadi *mode* bagi penduduk desa, segala kursus Pemberantasan Buta Huruf penuh dikunjungi oleh murid-murid.³⁴ Di lingkungan masyarakat, terutama bagi kaum perempuan, pandangan yang menganggap bahwa pendidikan bagi kaum perempuan adalah suatu hal yang tidak penting semakin lama semakin terkikis. Kursus pemberantasan buta huruf yang gencar dilakukan mampu mengubah pandangan mereka.

Program pemberantasan buta huruf yang dilakukan pemerintah Indonesia ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan taraf kecerdasan masyarakat, dimana sebagai suatu sarana untuk mencapai taraf kehidupan sosial ekonomi ke tingkat yang lebih baik. Pemberantasan buta huruf yang diadakan

di Kabupaten Kulon Progo selain berdampak sosial dan budaya tentu saja juga berdampak bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Meski dampak ekonomi dari kursus pemberantasan buta huruf tidak secara langsung terlihat, namun kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperoleh masyarakat tentu akan berdampak baik bagi peningkatan taraf kehidupannya. Walaupun lulusan kursus pemberantasan buta huruf hanya memiliki kemampuan baca, tulis, dan berhitung, hal ini dirasa jauh lebih baik daripada masyarakat yang masih belum melek huruf sama sekali. Masyarakat yang sudah melek huruf memiliki bekal untuk belajar lebih banyak hal lagi, dan memiliki nilai lebih untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Secara umum kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo bergantung pada hasil bumi seperti pertanian dan perkebunan. Agar masyarakat lebih sejahtera, pemerintah berupaya untuk memperbanyak hasil-hasil bumi dan memperbaiki pertanian rakyat.³⁵ Namun yang menjadi permasalahan pada saat itu adalah mayoritas masyarakat Kabupaten Kulon Progo masih buta huruf. Hal ini menyebabkan terhambatnya komunikasi dan penyebaran informasi dari jawatan-jawatan yang bersangkutan, terkait usaha peningkatan produksi pada bidang-bidang ekonomi tersebut, serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam karena kurangnya

³⁴ Jawatan Pemerintahan Umum buku 1 No. 670, *Laporan keadaan desa-desa di Kabupaten Kulon Progo tahun 1956*, hlm. 1.

³⁵ Jawatan Pemerintahan Umum buku 1 No. 667, *Laporan keadaan desa-desa di Kabupaten Kulon Progo tahun 1953*, hlm. 2.

literasi, yang akan berdampak pada hasil produksi yang kurang optimal. Untuk itu, penuntasan buta huruf menjadi sebuah keharusan agar usaha peningkatan pada bidang-bidang ekonomi dapat tercapai.

Keberhasilan penuntasan buta huruf di Kabupaten Kulon Progo, memudahkan pemerintah dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Pada bidang pertanian, untuk memperbaiki pertanian rakyat, Jawatan Pertanian selalu berdaya upaya dengan memberikan pengetahuan tentang cara dan pemeliharaan tanaman. Dengan kemampuan membaca, masyarakat petani juga dapat dengan mudah memahami isi bacaan, misalnya membaca hal-hal tentang tanaman padi yang lebih baik dengan diberi pupuk, dengan pengairan seperti apa, dan lain sebagainya.³⁶

Kondisi tersebut membuat bidang pertanian di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain hasil produksinya meningkat, pengelolaan pertaniannya juga sudah mulai terorganisasi. Berdasarkan laporan triwulan tentang keadaan desa-desa Kabupaten Kulon Progo, mulai terlihat adanya peningkatan koperasi-koperasi termasuk koperasi tani pada triwulan ke I tahun 1953 dengan jumlah 45 buah meningkat menjadi 48 buah pada triwulan ke IV tahun 1953. Koperasi tani ini berfungsi untuk mencari bibit dan menjual hasil bumi secara bersama-sama. Selanjutnya di beberapa desa juga sudah ada pendirian lumbung-

lumbung untuk penyimpanan bibit dan persediaan padi untuk masa paceklik. Lumbung semacam ini terdapat di beberapa *kanewon* seperti Temon, Pengasih, dan Galur.³⁷

Disamping dari mata pencaharian sebagai petani, sebagian masyarakat mulai tertarik dengan pekerjaan sebagai pedagang, walaupun masih menjadi pedagang kecil-kecilan. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang dimiliki pedagang tentu memudahkan dalam mengenali uang dan memudahkan ketika bertransaksi, sehingga tidak akan salah dalam menghitung. Jenis pekerjaan juru tulis, tukang, dan buruh-buruh pun telah bertambah banyak juga. Hal ini menunjukkan, bahwa bebas buta huruf dapat memudahkan seseorang untuk mencari pekerjaan, dan akan memudahkan segala pekerjaan yang dilakukan.

Pendidikan yang diperoleh dari kursus PBH meski hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung pada saat itu sudah dipandang baik. Masyarakat yang semakin terdidik akan semakin tumbuh kesadarannya untuk mencari penghidupan yang lebih baik, agar kesejahteraannya meningkat. Masyarakat yang awalnya tidak memiliki pekerjaan atau hanya mengandalkan pekerjaan sebagai petani di ladang orang lain dengan upah yang sedikit, mulai beralih mencari mata pencaharian lain.

Mereka berdagang dan menjadi buruh-buruh pabrik pembuatan minyak kelapa, pembuatan gula kelapa, pembuatan tahu tempe

³⁶ S. Hadiwaloejo, "Guru P.B.H dalam Masyarakat", *Suara Pendidikan Masyarakat*, Maret/April 1957, hlm 27.

³⁷ Jawatan Pemerintahan Umum buku 1 No. 667, *op.cit.*, hlm. 2.

dan lain sebagainya.³⁸ Kondisi ini membuat angka pengangguran di Kulon Progo semakin berkurang. Bertambahnya masyarakat yang memiliki pekerjaan yang lebih baik dari segi upah dan pekerjaan yang dikerjakannya tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Keadaan pendidikan di Kulon Progo yang tertinggal semakin memburuk pada masa penjajahan Jepang. Banyak sekolah ditutup sebagai salah satu bentuk sikap anti Belanda. Beberapa sekolah kemudian dibuka kembali dengan nama dan sistem pengajaran baru yang sesuai dengan semangat kemiliteran Jepang. Sebelum abad ke-20, penduduk Kulon Progo umumnya hanya mengenal pendidikan tradisional keagamaan yang dilaksanakan di masjid ataupun surau.

Pemberantasan buta huruf di Kulon Progo terbukti menurunkan angka buta huruf yang ada. Pemberantasan buta huruf memberikan pengaruh positif terhadap bidang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kulon Progo. Melek huruf secara tidak langsung juga mempengaruhi sikap, pandangan, serta gaya hidup masyarakat. Masyarakat yang awalnya tidak mementingkan pendidikan menjadi sadar bahwa pendidikan itu penting. Dengan melek huruf masyarakat akan lebih berdaya dan lebih mudah dalam mendapatkan banyak ilmu. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran di Kulon Progo.

Kemajuan bidang pertanian dan perkebunan di Kulon Progo mulai terlihat setelah para petaninya terbebas dari buta huruf. Petani yang semakin teredukasi membuat pengelolaan pertanian di Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih terorganisasi, karena mulai muncul kelompok-kelompok tani dan koperasi tani yang didirikan demi kemajuan bersama. Hasil-hasil yang dicapai dari upaya pemberantasan buta huruf di Kulon Progo selama tahun 1942-1962 tersebut telah membawa masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun tingkat buta huruf ini tidak secara langsung menjadi penyebab meningkatnya taraf hidup masyarakat Kulon Progo, namun dengan penurunan angka buta huruf ini menandakan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang semakin bertambah besar.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Arsip Puro Paku-Alaman No.1518.

Arsip Puro Paku-Alaman No. 1519.

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2068.

Buku dan Artikel

Ary H. Gunawan, *Kebijakan Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Asti Kurniawati, *Membangun (?) Narasi, \menghadirkan Pesona akar dan Perjalanan Citra Yogyakarta "Kota Pendidikan"*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Badan Pusat Statistik Kulon Progo, *Kulon Progo dalam Angka 2005/ Kulon Progo in Figur 2004*, Wates: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2004.

³⁸ Jawatan Pemerintahan Umum buku 1 No. 667, *loc.cit.*

- Djohan Makmur, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993
- Hadiwaloejo, S., "Guru P.B.H dalam Masyarakat", *Suara Pendidikan Masyarakat*, Maret/April 1957.
- Helius Sjamsuddin, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional.
- Jawatan Pemerintahan Umum buku 1 No. 670, *Laporan keadaan desa-desa di Kabupaten Kulon Progo tahun 1956*.
- Jawatan Pemerintahan Umum buku 1 No. 667, *Laporan keadaan desa-desa di Kabupaten Kulon Progo tahun 1953*.
- Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2 No. 811.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2005.
- Louis Gottschalk, *Understanding History Understanding History: A Primer Historical Method*, a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Mariyono, "Strategi Pemberantasan Buta Aksara Melalui Penggunaan Teknik Metastatis Berbasis Keluarga", dalam *Pancaran*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Mulyani A. Nurhadi, "Program Kerja Strategi Pendidikan Nonformal di Indonesia", *Cakrawala Pendidikan*, Edisi 1, Th. III, 1983.
- Nasruddin Anshory dan GKR Pembayun, *Pendidikan Berwawasan Kebangsaan: Kesadaran Ilmiah Berbasis Multikulturalisme*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Soedarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung, 1970.
- Sri Sutjiatiningsih dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980/1981.
- Sumarsono Mestoko, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Suradi H.P., dkk., *Sejarah Pemikiran dan Kebudayaan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inveventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986..

Yogyakarta, 17 Oktober 2019

Reviewer

Pembimbing


Danar Widiyanta, M.Hum
NIP. 19681010 199403 1 001


Ririn Darini, S.S., M.Hum
NIP. 19741118 199903 2 001

